

HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE
PADI MENURUT TOKOH AL-WASHLIYAH DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SKRIPSI

Oleh:

MARDIAH NASUTION
22144005



JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2018

**HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE
PADI MENURUT TOKOH AL-WASHLIYAH DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
Oleh:

MARDIAH NASUTION

22144005



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2018**

IKTISHAR

Judul ini di ambil untuk menyelesaikan permasalahan terkait hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut tokoh al-washliyah dan muhamdiyah. Dimana Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu pernjjian antara petani dengan tokeh padi (orang yang memberikan hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut petani akan mendapatkan pinjaman uang dari tokeh padi untuk mengerjakan sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkwintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen. Dan dari pelaksanaan ini pertentangan antara ulama di kecamatan Kualuh Hilir berbeda. Patut bahwa penelitian ini di bahas.

Skripsi ini berisi atas lima bab dimana per babnya diisi dengan masing masing penjelasan. Di Bab I yang berisi tentang latar belakang, di bab II berisi tentang Kajian Pustaka tinjauan umum tetnang hutang piutang, di Bab III berisi tentang Sejarah Alwashliyah dan Muhammadiyah, di Bab IV berisi tetang Hasil Penelitian dan di Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan kajian lima bab ini nantinya bisa menjawab dari permasalahan.

Dan adapun metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dimana berpungsi membandingkan dua pendapat atau lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diantara dua pendapat tersebut.

Dan adapun hasil penelitian ini menjelaskan tentang hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi ini menjelaskan bahwa jenis akad ini menurut hemat penulis adalah haram disebabkan mengandung unsur ghoror. Dimana peminjaman ini berdasarkan unsur pemaksaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

4. Bapak Drs. Aripin Marpaung, MA Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dosen Pembimbing I, Aripin Marpaung, MA, dan Dosen Pembimbing II, Ahmad Zuhri, MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari

berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 2018

Penulis

DAFTAR TRANSLITERASI¹

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

¹Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

ض	Di	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

- a. Vocal rangkap (سَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيِّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
 4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (هَدَدٌ = *ḥaddun*), (سَدَدٌ = *saddun*), (تَيِّبٌ = *ṭayyib*).
 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
 6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
 7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيُهُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar	iii
Transliterase	vi
Daftar isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG

A. Definisi Dan Dasar Hukum Hutang Piutang	22
B. Dasar Hukum Hutang Piutang	30

	C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang	33
	D. Hutang piutang Bersyarat.....	44
BAB III	SEJARAH ALWASHLIYAH DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN KUALUH HILIR DAN LETAK GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Berdirinya Al-Washliyah	42
	B. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah	62
	C. Letak geografis lokasi penelitian	78
BAB IV	HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE PADI MENURUT TOKOH AL-WASHLIYAH DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	
	A. Praktek hutang Piutang Bersyarat antara petani dan Tauke Padi di kecamatan Kualuh Hilir	81
	B. Pendapat beserta dalilTokoh Al Washliyah kecamatan Kualuh Hilir	82
	C. Pendapat beserta dalilTokoh Muhammadiyahkecamatan Kualuh Hilir	85
	D. MunaqosyahAdillah.....	87
	E. Menentukan pendapat yang paling rajih	92

F. Pendapat yang paling relevan untuk diaplikasikan di

Masyarakat kecamatan Kualuh Hilir 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp. 2.000,00 akan dibayar Rp.2000,00 pula “sedangkan menurut bahasa arab hutang-piutang sering disebut dengan alqardh.²

Bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syari'at Islam. Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun jika peminjaman itu memberikan sesuatu sebagai

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar BAru Algensido, 2007), hlm.306

tanda terimakasih dan tanpa diminta hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.³

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan demikian hutang-piutang uang dianggap hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat.⁴

Dalam konsep Islam kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung kepada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan

³Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 63

⁴Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 242

yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara bathil melakukan setiap perniagaan.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini

ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁵

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihi banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin.⁶

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm.37

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm.61

wajib baginya member hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan orang itu.

teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama. Seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hutang-piutang yaitu karena keadaan darurat, kesulitan hidup sehingga berhutang atau meminjam kepada orang lain, dan cenderung untuk menikmati kemewahan. Melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk memilikinya, karena tidak mempunyai uang maka terpaksa berhutang.⁷

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang⁸. Hutang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 36

⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta: Rajawali pers, 2002),hlm.

karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Hal ini berbeda dengan praktek hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Kulih Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani , dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada yang sawahnya yang hanya menyewa kepada orang lain guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun di Kecamatan Kualuh hilir ini ada yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk mengerjakan sawahnya. Disamping itu terkadang banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani

mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha sambilan (sampingan).

Apabila seorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan, upaya apapun harus dilaksanakan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para petani Kualuh Hilir melaksanakan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir yaitu : Misalkan si A sebagai petani, sedang si B sebagai tokeh padi. A berkata pada si B mau membeli bahan sejenis racun atau pupuk senilai satu sak pupuk yang harganya senilai Rp. 500.000 untuk mengerjakan lahan sawah”, lalu si B menjawab “saya mau memberikan kamu pupuk tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa mendapatkan uang Rp.600.000. maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.100.000 dari hasil padi yang didapat dari si A.

Perjanjian hutang-piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagai lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung dan digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara petani dengan tokeh padi (orang yang memberikan hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut petani akan mendapatkan pinjaman uang dari tokeh padi untuk mengerjakan sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkuintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

Dalam masalah ini Ada pendapat para Tokoh Ormas yang saling bertentangan yakni antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Diantara ormas yang berbeda pendapat tersebut adalah tokoh Al-Washliyah dan Muhammadiyah.

- Menurut pendapat tokoh Al-washliyah yang bernama bapak Abduh S.Ag, dalam hal ini dengan cara pembayaran tersebut saya menafsirkannya itu termasuk kedalam riba, yang mana riba sudah jelas pengharamannya, karena adanya keharusan dan kewajiban pembayarannya. Hanya saja zaman sekarang banyak orang mengabaikan dan tidak mengikuti aturan hukum, sehingga mereka seakan tutup mata dan tutup telinga mengenai hal tersebut. Haram dikatakan sebab termasuk hutang dan pembayarannya yang di pungut manfaatnya sehingga yang berhutang merasa terbebani dan disitu terdapat kerugian kepada si yang berhutang tadi.⁹

⁹ Bapak Abduh S.Ag Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

Adapun dalil yang dia sebutkan adalah Al-qur'an surah Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

- Menurut Bapak Khoirul Azmi S.Pd selaku tokoh Al-washliyah, beliau berpendapat setiap hutang yang pembayarannya membawa keuntungan maka hukumnya riba, hal ini terjadi karena salah satunya mensyaratkan keharusan pembayaran atau penjualan kepada orang yang memberikan pengutangan kepada orang yang berhutang, dengan kata lain yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram.¹⁰
- Menurut pendapat Tokoh Muhammadiyah yang bernama bapak Akhyaruddin, menurut saya sah-sah saja. Karena, menolong orang yang

¹⁰Bapak Khairul Azmi S.Pd Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

dalam kesulitan adalah amalan yang sangat mulia. Memberi uang, barang atau pun sejenisnya kepada orang yang membutuhkan saya rasa itu wajar ada timbal baliknya. Ya wajar si pemberi hutang tadi meminta rasa timbal balik kepada orang yang berhutang tersebut. Selagi orang yang berhutang dan yang memberi hutang sama-sama rela dan ikhlas, Bahkan saya sendiri melakukan hal tersebut.¹¹

- Bapak Supyanto selaku tokoh Al-washliyah, pendapat saya Boleh, karena hutang kan memang harus dibayar dan wajib di bayar kepada orang yang memberi hutang. Ya sah saja apabila orang yang memberi hutang meminta penambahan harga atau mewajibkan memberikan hasil dari si pengutang kepada orang yang memberikan hutang, supaya hutangnya dapat terlunasi.

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan hutang-piutang di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti apakah masalah tersebut termasuk kedalam riba atau hanya sebagai imbalan pemberi hutang.

¹¹ Bapak Akhyaruddin Adalah Seorang Tokoh Muhammadiyah yang beralamat di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2017).

Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul :**HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE PADI MENURUT TOKOH AL-WASHLIYAH DAN MUHAMDIYAH.**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan Tauke Padi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhanbatu Utara ?
2. Bagaimana pendapat tokoh Al-washliyah dan Muhmmadiyah tentang hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan Tauke Padi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhanbatu Utara?
3. Pendapat mana yang paling relevan untuk di terapkan di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari kedua pendapat tersebut setelah diadakan munaqasyah adillah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan Tauke Padi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh Al-washliyah dan Muhmmadiyah tentang hukum hutang-piutang bersyarat antara petani dan Tauke Padi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhanbatu Utara.
3. Untuk mengetahui Pendapat mana yang paling relevan untuk di terapkan di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dari kedua pendapat tersebut setelah diadakan munaqasyah adillah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi.

2. Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wahana untuk menerapkan hukum islam dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam kegiatan hutang-piutang.

4. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir mengenai mekanisme hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu membandingkan beberapa pendapat untuk mendapatkan hasil perbandingan dan tidak lepas bahwa penelitian ini yang meneliti objek dilapangan untuk

mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari 7 desa, yaitu yang diambil sebagai sample adalah :

- Kampung Mesjid
- Desa Teluk Piai
- Desa Sei. Sentang
- Desa Sei. Apung

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹²Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers.Cet.VII. 1992), hlm. 18.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis. Semua hasil diperoleh data dari jawaban wawancara yang membahas persoalan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi sebagai objek penelitian.¹³

b. Sumber Data

Sumber data yaitu subyek darimana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari responden secara langsung dari wawancara.

2.. Data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku, literature-literatur yang di susun oleh para ahli yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas.

¹³Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan* (Jakarta:Rineka Cipta 1996), hlm. 127.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang institusi-institusi, benda-benda. Informasi tentang populasi sangat diperlukan untuk menentukan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Keseluruhan kepala keluarga (KK) yang pernah melakukan hutang-piutang di Kualuh Hilir.

F. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan

dilakukan terus menerus.¹⁴Menggambarkn hasil penelitian mengenai pendapat Ormas tentang Praktek Hutang-Piutang Yang Bersyarat Antara Petani Dan Pabrik Pembelian Padi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabuoaten Labuhanbatu Utara.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistemakita penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian,metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian awal membahas tentang akad atau transaksi dalam ekonomi Islam. Karena salah satu akad yang dikenal dalam ekonomi Islam dan

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Bandung: Alfabeta,2014), hlm.245.

berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan maka penulis akan membahas mengenai *qardh*.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bagian awal Menjelaskan Profil dari Al-Washliyah dan Muhammadiyah. Selanjutnya akan dilihat deskripsi wilayah penelitian, sejarah, kondisi wilayah dan data-data pada obyek penelitian di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB IV : HUKUM HUTANG-PIUTANG YANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE PADI MENURUT TOKOH ALWASHLIYAH DAN MUHAMMADIYAH DI KEC.KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA.

Bab ini akan menjelaskan pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah mengenai Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulis akan membagi dua sub bab yang meliputi :
Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta. Rajawali Pers, 2002

Huda nurul, dan Heykal Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Prenada Media Group, 2010

Karim Helmi, *Fiqh Muamalh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensido, 2007

Sugiono, *Metodologo Penelitian Statistik*. Bandung. Alfabeta, 2008

Suharsimi Arikanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 1996

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008

Suryabrata Umadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rajawali Pers, 1992

Ya'kub Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung. Diponegoro, 1995

BAB II

PENGETAHUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG BERSYARAT

A. Definisi Hutang Piutang

Pengertian Al-Qard Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁵ Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qard, yang menurut bahasa berarti قَرْضٌ (potongan), dikatakan demikian karena Al-Qard merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qard).¹⁶ Menurut Hanafiyah, Al-Qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, hlm. 689

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013) h. 151

¹⁷ Ibid, hlm. 11

meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁸ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).²⁰ Dengan kata lain, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, AlQard dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau aqad saling membantu dan

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hlm. 27

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 56

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 59

bukan transaksi komersial.²¹ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai AlQardul Hasan. Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.²³ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa Al- Qardul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁴

Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni

²¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 131

²³Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm.97

²⁴Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996) hlm. 33

sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.²⁵

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, Al-Qardul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.²⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa

²⁵ M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997, hlm. 40

²⁶ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001) hlm. 42

definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Qard (utangpiutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Firman Allah SWT

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah (Yang punya kuasa) menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al Baqarah: 245)²⁷

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 102

Kata lain dari Al-Qard adalah 'ariyas, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.²⁸

Adapun letak perbedaan antara Al-Qard dan 'ariyas adalah kalau Qard mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan 'ariyas hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.²⁹

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 902

²⁹*Ibid*, hlm.69

kebutuhan umatnya. Adapun Qard diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup, terkadang kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara. Dan pada saat utang menjadi pilihan. Islam

membolehkan utang-piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa,
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin,
3. Member pinjaman dengan ikhlas untuk membantu,
4. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya,
5. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar,
6. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan,
7. Hutang pitang tidak disertai dengan jual beli,
8. Menghindari praktik ribawi,
9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan,
10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran,
11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran,
12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.

Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), Hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang

terdesak. Hutang-Piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang:

1. Menyebabkan stress,
2. Merusak akhlak,
3. Dihukum layaknya seorang pencuri,
4. Jenazahnya tidak dishalatkan,
5. Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid,
6. Urusannya masing menggantung,
7. Tertunda masuk surga,
8. Pahala adalah ganti hutangnya.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

Artinya : ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya. (Q.S. Al-Maidah (5)).³⁰

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolongmenolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-

³⁰Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 157

Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Albaqoroh (2) : 282).³¹

³¹*Ibid*, hlm. 70

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

C. Rukun dan Syarat hutang Piutang

Dari pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan

demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a. 'aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b. Ma'qud'alah yaitu barang yang diutangkan.
- c. Sihgat yaitu ijab qabul.³²

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- a. Orang yang memberi utang.
- b. Orang yang berutang.
- c. Barang yang diutangkan.
- d. Ucapan ijab qabul.³³

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utangpiutang itu ada tiga, yaitu:

- a. Lafaz (ijab qabul)
- b. Yang berutang dan perpiutang

³²Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996) hlm. 93

³³Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997) hlm. 110

c. Barang yang diutangkan.³⁴

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1) Syarat-syarat 'Aqaid

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah 'aqid atau 'aqidayni. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat 'aqid dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang

³⁴Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996) hlm. 243

tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.³⁵

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
- b. Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain.

2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.

³⁵Sayyid Sabiq, *Op, Cit* hlm. 131

- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁶

3) Syarat-syarat akad (sighat)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.³⁷

³⁶Ismail Nawawi, *Op, Cit* hlm. 110-111

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) hlm. 38

Di samping adanya syarat rukun sahnya utangpiutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utangpiutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utangpiutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah

disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.³⁸

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثَرُكُمْ بَعْضُهَا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

³⁸Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) hlm. 106

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.(Q.S. Al-Baqoroh (2) : 283).³⁹

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utangpiutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1. Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.⁴⁰

2. Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

³⁹Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 71

⁴⁰Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit* hlm. 40

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktuwaktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat

lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.⁴¹

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utangpiutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.⁴²

5. Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka

⁴¹*Ibid*, hlm. 44

⁴²*Ibid*, hlm. 45

sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.

6. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

7. Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

D. Hutang Piutang Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.

2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.

3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁴³

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.⁴⁴

Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

⁴³Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, JuzII*, Rineka Cipta, Cet.4, (Jakarta: 2004) hlm. 342

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 342

Sebagaimana firman Allah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَإِنْ أَثِمَ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S. Albaqoroh (2) : 283).⁴⁵

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁴⁶

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 71

⁴⁶Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985) hlm. 342

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tangguhan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.⁴⁷

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya.

Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁴⁸

⁴⁷Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993) hlm. 119

⁴⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996) hlm. 112

BAB III

SEJARAH AL-WASHLIYAH DAN MUHAMMADIYAH DAN LETAK GEODRAFIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Al-Washliyah

Berdirinya Al-Washliyah di latar belakang oleh kesadaran beberapa pelajar dan guru yang tergabung dalam perguruan Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), dimana pada saat itu mereka berkeinginan untuk membuat wadah organisasi yang lebih besar dari organisasi sebelumnya “*Debating Club*” yang tampaknya cukup berhasil dalam program-programnya dan dipandang sangat bermanfaat. *Debating Club* merupakan sebuah wadah organisasi kecil untuk mendiskusikan pelajaran maupun persoalan-persoalan sosial keagamaan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Pendirian *Debating Club* pada tahun 1928 ini mulanya sebagai sikap kritis para alumni dan murid senior MIT tentang diskusi-diskusi mengenai Nasionalisme dan paham keagamaan yang terutama didorong oleh kaum pembaharu.⁴⁹

⁴⁹Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Islam Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 321.

Organisasi Al-Washliyah didirikan di Sumatra Utara tepatnya di kota Medan pada tanggal 30 November 1930 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab

1349 H, diberi nama Al-Washliyah yang bermakna organisasi yang ingin menghubungkan dan mempertalikan. Hal ini berkaitan dengan keinginan memelihara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama baik antarsuku, antarbangsa, dan lain-lain.⁵⁰ Nama organisasi ini diambil dari ayat Al-Qur'an surat *Ar-Ra'd* ayat 21:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ



⁵⁰ Haidar Putra Daulay, *Sejarah pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hal. 76

*Artinya: “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.”(QS. Ar-Ra’ad: 21).*⁵¹

Demikianlah nama dari Al-Washliyah yang memancarkan cita-cita yang tinggi dan diharapkan dapat menjadi roh bagi para anggotanya.

Setelah didirikan secara resmi, maka ditetapkanlah susunan kepengurusan organisasi Al-Washliyah yang berkedudukan di kota Medan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Isma’il Banda (Ketua I)
- 2) A. Rahman Sjihab (Ketua II)
- 3) M. Arsjad Thalib Lubis (Penulis I)
- 4) Adnan Nur (Penulis II)
- 5) H. M. Ya’kub (Bendahara)
- 6) Sjech H. Muhammad Junus (Penasihat)
- 7) H.Sjamsuddin, H. Jusuf A. Lubis, H. A. Malik,dan A. Azis Effendi (Sebagai pembantu-pembantu).⁵²

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahny* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 231

Berdirinya organisasi Al-Washliyah tidak tergantung pada seorang tokoh sentral karismatik sebagaimana halnya Muhammadiyah ataupun NU, pendirian dan pertumbuhan organisasi ini merupakan hasil upaya bersama beberapa tokoh dengan peran dan keistimewaannya masing-masing. Syekh Muhammad Yunus adalah tokoh yang dituakan dan biasanya dianggap sebagai pendiri Al-Washliyah bukanlah yang berperan penuh atas pendirian Al-Washliyah melainkan adanya tokoh-tokoh lain diantaranya Abdurrahman Syihab yang mempunyai kemampuan tinggi dalam rekrutmen anggota, Arsyad Thalib Lubis dengan ilmu pengetahuan Islam yang sangat tinggi, Udin Syamsuddin dengan keahlian administrasi dan manajemen yang mana kesemuanya dipersepsi sebagai orang-orang yang berperan penting dalam pendirian dan pengembangan organisasi ini sehingga dikalangan pengikutnya tidak dijumpai kecenderungan untuk menganggap salah satu pimpinannya sebagai tokoh sentral.

⁵² Andewi Suhartini, *Sejarah pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 156

Secara organisatoris, Al-Washliyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berakidah Islam dan bermadzhab Syafi'i serta beriktikad *ahlussunnah wal jam'a'ah*. Dengan misi berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara dari jajahan penjajah dan berorientasi pada kemajuan pendidikan Islam dengan pembaharuan pada sistem pendidikan.⁵³

Adapun fase perkembangan Al-Washliyah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, fase berdirinya sampai menjelang kemerdekaan (1930-1942).

Dalam fase ini kegiatan terpusat kepada pembinaan kader ulama dan pendidik. Kader-kader fase inilah yang melanjutkan usaha Al-Washliyah sekarang ini.

Kedua, fase kedua yaitu sewaktu masuknya penjajahan Jepang sampai kemerdekaan RI (1942-1947). Dalam fase ini kegiatan terarah kepada melawan atau menumpas penjajahan. Kegiatan pendidikan berhenti dan beralih kepada kegiatan pembentukan Laskar Allah yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Hizbullah, Sabilillah, Tentara Pelajar, dan Dapur Umum. Kegiatan pena ulamanya menulis "Tuntunan Perang Sabil" oleh alm. H.M.

⁵³Andewi Suhartini. *Sejarah pendidikan Islam*, hlm. 160

Arsyad Thalib Lubis, dan “Do’a ke Medan Perang” disusun oleh Pemuda Al-Washliyah.

Ketiga, fase perjuangan politik (1947-1955), yaitu di mana Indonesia sedang menyusun negaranya dengan undang-undang dan kabinetnya. kegiatan tertuju kepada mensukseskan pemilu I dan turut menyiapkan konsep bernegara dengan undang-undang konstituante.

Keempat, kembali fase pembinaan (1955-1965). Pembinaan organisasi dan pendidikan meluas keseluruh tanah air Indonesia, , pulau Jawa dan Kalimantan.

Kelima, fase perluasan Misi Zending dan Penyiaran Islam (1965-1972). Pada fase ini, pelajar dan mahasiswa serta putra-putri dan pemuda Al-Washliyah, giat mengislamkan suku terasing di pegunungan Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kepulauan Mentawai, dan Irian Jaya.

Keenam, fase agak suram (1972-1983) dimana keterlibatan anggota Al-Washliyah dalam partai politik mempengaruhi akan kesegaran jalannya organisasi dan pendidikan Al-Washliyah. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mengutamakan partainya dari pada pembinaan umat dan ukhuwah Islamiyah.

Ketujuh, fase penataan kembali dan perluasan yaitu (1983 sampai mukhtamar ke XVII). Diterbitkan kembali organisasi seperti telah dilaksanakan kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah di Sumatera Utara, konferansi wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pemberian mandat untuk pembentukan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Irian Jaya, pendataan sekolah-sekolah dan perguruan Al-Washliyah. Selain itu, dalam operasionalnya Al-Washliyah didukung oleh Badan Otonom Organisasi yang meliputi: muslimat Al-Washliyah (Organisasi Wanita), Gerakan Pemuda Al-Washliyah (Organisasi Pemuda), Angkatan Putri Al-Washliyah (Organisasi Putri), Ikatan Putra-Putri Al-Washliyah (Organisasi Remaja), dan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (Organisasi Mahasiswa). Inilah gambaran sekilas tentang Al-Washliyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan dan pendidikan Islam di Indonesia dari waktu ke waktu yang mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Tetapi hal yang terpenting untuk diungkap kali ini adalah bagaimana peranan dan kiprahnya dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam.⁵⁴

1. Peranan Organisasi Al-Washliyah

Organisasi Al-Washliyah yang dalam pendiriannya diprakarsai oleh para tokoh ‘ulama mendapatkan sambutan hangat oleh para masyarakat Islam di tanah Medan. Hal ini menjadikan organisasi ini dapat menjalankan aktivitas keorganisasian dengan baik, hingga pada aktivitas dalam ranah sosial keagamaan pun mampu dimaksimalkannya.⁵⁵ Dapat dibuktikan dengan sepak terjang yang dilakukan organisasi ini dalam mensyiarkan ajaran Islam di seluruh kawasan di Sumatra Utara.

Al-Washliyah dipandang sebagai organisasi sosial keagamaan bersifat tradisional dalam paham keagamaan (ciri khas Syafi’iyyah), tetapi modernis dalam pendidikan Islam (bentuk lembaga pendidikan yang didirikan seperti madrasah dan sekolah serta sistem dan kurikulum yang digunakan). Namun dalam sepak terjangnya ternyata Al-Washliyah tidaklah berkecimpung saja pada dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari majlis-majlis yang didirikan oleh Al-

⁵⁴Hasbullah, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: LSIK 1996), hlm. 135.

⁵⁵Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 326-327.

Washliyah, seperti: Majelis Hazanatul Islamiyah sedianya dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan anak yatim, membantu penyiaran Islam, dan orang-orang yang baru masuk Islam, utamanya di daerah Toba, Tapanuli Utara dan Tanah Karo. Kendala finansial tampaknya membuat program majelis ini tidak membuahkan hasil yang memadai. Sistem keuangan Al-Washliyah yang terlalu sentralistis kurang memungkinkan dilakukannya inovasi-inovasi di bidang upaya pengumpulan dana. Strategi Al-Washliyah dalam penyiaran Islam di daerah Batak Toba dengan melakukan *tabligh* dan mendirikan sekolah serta madrasah adalah satu aspek yang khas mengenai organisasi ini. Tanah Batak Toba adalah titik awal penyebaran agama Kristen di Sumatera Timur yang sudah berjalan relatif berhasil sejak abad ke-19. Pada awal ke-20, mayoritas penduduk daerah ini beragama Kristen, sebagian lain menganut agama tradisional, Parbegu, dan hanya sebagian kecil yang memeluk Islam ini kegiatan Al-Washliyah di daerah ini adalah pegislaman dan pembinaan mereka yang sudah masuk Islam.⁵⁶

⁵⁶ Saifuddin Zuhri, K.A., *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perlembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), hal. 124.

Program-program Al-Washliyah yang secara spesifik ditujukan untuk Islamisasi daerah ini menempatkannya berhadapan langsung dengan misi Kristen. Laporan-laporan tentang persaingan ini yang sering kali mengambil bentuk pertentangan di tengah masyarakat banyak muncul dalam terbitan-terbitan di Sumatera Timur saat itu. Bukan rahasia lagi bahwa misi Kristen di Tanah Toba dan tempat lainnya mendapat dukungan khusus dan pemerintah Belanda maupun Gereja Kristen dan Eropa. Dukungan ini bisa mengambil bentuk keberpihakan ataupun kebijakan pemerintah Belanda yang menguntungkan umat Kristen, sebagaimana sering terlihat dalam keluhan dan protes umat Islam via Al-Washliyah tentang perlakuan pejabat pemerintah lokal yang tidak adil. Dukungan lain yang tidak kalah signifikan adalah dalam bentuk dana. Meskipun pada level formal pemerintah kolonial mengaku netral terhadap agama-agama, perbandingan dana yang diberikan kepada umat Islam dan kepada umat Kristen adalah sekitar 1:4 dan sama sekali tidak mencerminkan kebijakan ini.

Keberhasilan dan kegagalan yang dialami Al-Washliyah dalam penyiaran Islam di Toba merupakan ilustrasi menarik tentang persaingan penyiaran agama Islam dan Kristen, Dibanding dengan organisasi-organisasi lain yang juga

mencoba berdakwah di Tanah Batak, Al-Washliyah “dipandang sebagai organisai yang mampu bersaing dengan kalangan misionaris Kristen di daerah tersebut, sehingga pada konggres MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) yang ke III memutuskan bahwa organisasi Al-washliyah sebagai pemimpin pengelolaan zending Islam pada waktu itu yang didukung sepenuhnya oleh organisasi-organisasi Islam lain.

Dalam pergaulan antar organisasi Islam Al-Washliyah sangatlah menjunjung tinggi kerukunan dan memiliki rasa saling peduli serta toleransi terhadap organisasi lain. Hal tersebut tergambar jelas dalam program-program dan prioritas-prioritasnya, serta dalam sikap yang diambilnya terhadap klompok lain. Meski secara formal mengikat diri dengan madzhab Syafi’i sebagai aliran peamahaman agama, ciri keterbukaan organisasi ini juga sangat menonjol, tidak ragu belajar dan bekerja sama dengan Muhammadiyah dan pada saat yang lain juga tidak pula canggung mengambil posisi bertentangan dengan tarekat Naqsabandiyah.⁵⁷

⁵⁷Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal.330.

Al-Washliyah dalam bidang pengembangan pendidikan Islam sangatlah besar peranannya pada saat itu, terutama di daerah Sumatra Utara. Hal ini dapat dilihat dari sumbangsih-sumbangsih pemikiran organisasi ini sebagai upaya memajukan dan mengembangkan pendidikan Islam dengan modernitas sistem namun juga masih tetap memegang teguh tradisonalitas, yaitu dengan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum secara komprehensif dengan tujuan agar umat Islam nantinya mampu menghadapi perkembangan zaman.

Dalam upayanya memajukan pendidikan, Al-Washliyah kelihatannya bersikap terbuka dan mengambil dari mana saja yang dianggap lebih berpengalaman dan berhasil dalam pengelolaan pendidikan. Pada tahun 1934, Al-Washliyah mengirim tiga orang pengurusnya M. Arsyad Thalib Lubis, Udin Syamsnaddin dan Nukman Sulaeman untuk mengadakan studi banding ke Sekolah Adabiyah, *Noormal School* dan Diniyah di Sumatera Barat dalam rangka reformasi pengelolaan pendidikan Al-Washliyah sendiri. Meskipun mendapat reaksi negatif dari sebagian anggota, kunjungan tersebut dianggap sangat penting dan hasil-hasilnya kemudian menjadi bahan diskusi dalam konferensi guru-guru Madrasah Al-Washliyah sendiri masih pada tahun yang

sama. Diantara langkah yang diambil setelah konferensi tersebut adalah: pendirian sekolah-sekolah umum berbasiskan agama, pengajaran bahasa Belanda, penataan kalender pengajaran, pembentukan lembaga Inspektur dan Penilik pendidikan. Melihat kemajuan penerbitan buku-buku agama Islam di Sumatera Barat, seorang utusan dikirim ke Bukittinggi khusus untuk membeli buku-buku keperluan sekolah Al-Washliyah.

Disektor pendidikan umum dibuka pula HIS berbahasa Belanda di Porsea dan Medan dengan menambahkan pelajaran agama Islam pada kurikulumnya. Pada kongres III tahun 1941, Al-Washliyah dilaporkan mengelola 242 sekolah dengan jumlah siswa lebih dan 12.000 orang. Sekolah-sekolah ini terdiri atas berbagai jenis: Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul ‘Ali (Aliyah), Muallimin, Muallimat, *Volkschool*, *Vervolgschool*, HIS, dan *Schakelschool*. Berdasarkan Peraturan atau Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan majelis Pendidikan & Kebudayaan Pengurus Besar Al-Washliyah Pasal 9 dijelaskan bahwa jenis madrasah/perguruan Al-Washliyah meliputi:

- 1) Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah, Al-Qismul ‘Ali dan yang sederajat;
- 2) Pesantren Ibtidaiyah/Tsanawiyah, Al-Qismul ‘Ali dan yang sederajat;
- 3) Sekolah TK, SD, SMTP, SMTA; dan

4) SMTP, SMTA yang diasramakan.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan yang dianut oleh Al-Washliyah bersifat variatif dan tidak banyak lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan saja seperti madrasah, tetapi juga sekolah yang identik dengan lembaga pendidikan umum.

Adapun tingkatan madrasah-madrasah Al-Washliyah, lama belajar dan Persentase kurikulumnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan Tajhiziyah dengan lama belajar 2 tahun, diperuntukkan bagi anak-anak yang belum pandai membaca dan menulis Al-Qur'an. Materi pelajarannya adalah membaca menulis Al-Qur'an (tulisan Arab yang berbaris), serta ibadah sembahyang dan praktik ibadah lainnya.
2. 2. Tingkatan ibtidaiah yang merupakan lanjutan dari tajhiziyah dengan lama belajar 4 tahun bagian pagi dan 6 tahun bagian sore. Materi pelajarannya berkisar 70 % ilmu agama dan 30 % ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang digunakan antara lain *Durusul Lughah al-Arabiyyah* (Mahmud Yunus), *Al-jurumiyah*, *Matan Bina'*, *Hidayatul Mustafid*, dan lain-lain.

3. Tingkatan Tsanawiyah yang merupakan lanjutan dari Ibtidaiyyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi peajarannya berkisar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang dignnakan antara lain *Tafsiiru al-Jalaalain*, *Al-Luma'*, *Jawaahirul Balaaghah*, *'Ilmu al-Mantiq*, dan lain-lain.
4. Tingkatan Qismul 'Ali yang merupakan lanjutan dari Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun. Materi pelajarannya berkisar 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum. Di antara kitab-kitab yang digunakan antara lain *Tafsiiru Al-Baidhawi*, *Al-Mahalli*, *Jam'ul Jawaami'*, *al-Asybah wan Nadhaair*, dan lain-lain.
5. Tingkatan Takhassus yang merupakan lanjutan dan Qismul 'Ali dengan lama belajar 2 tahun. Materi pelajarannya adalah khusus memperdalam ilmu agama dan keahlian tertentu.
6. Di beberapa tempat didirikan Sekolah Guru Islam (SGI) untuk mempersiapkan guru-guru yang cakap mengajar pada tingkatan Ibtidaiyah dan sekolah-sekolah S.R. umum. Yang diterirna menjadi murid adalah

tamatan ibtidaiyah. Materi pelajarannya herkisar 50% ilmu agama dan 50% ilmu umum.⁵⁸

Selain mendirikan madrasah, Al-Washliyah juga mendirikan sekolah umum antara lain:

1. Sekolah Rakyat (SR) Al-Washliyah dengan lama belajar 6 tahan. materi peajarannya 70% ilmu umum dan 30 % ilmu agama. Pelajaran umumnya setingkat dengan SR Negeri.
2. SMP Al-Washliyah dengan lama belajar 3 tahun . matri pelajaranya 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Pelajaran umumnya setingkat dengan SMP Negeri.
3. SMA Al-Washliyah dengan lama belajr 3 tahun. Materi pelajaranya 70 % ilmu umum dan 30 % ilmu agama. Pelajaran umunya setingkat SMA Negeri.

Kemudian Al-Washiliyah telah mampu mendirikan perguruan Tinggi Agama Islam di Medan dan Jakarta.⁵⁹

⁵⁸Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Kencana 2007),hal. 98

B. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan socialreligius, dan moral. Kegelisahan social ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku social dan positif disamping sarat dengan takhayul, bid'ah dan khurafat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Ditinjau dari berbagai faktor, menurut M. Kamal Pasha dan A. Adaby Darban dalam bukunya "Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif Historis dan Idiologis" latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 faktor penyebab,⁶⁰ yaitu:

1. Faktor Individu KH. Dahlan (Subyektif)

⁵⁹Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal. 331.

⁶⁰Mustafa Kamal Pasha dan Adabi Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis* (LPPI UMY, 2003). hlm.120

Faktor subyektif⁶¹ yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah pendalaman dan kajian KH. A. Dahlan terhadap al-Qur'an yang kritis. Ketika memahami QS. Ali Imron:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imron: 104).⁶²

Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi KH. A. Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi, atau persyarikatan yang teratur, dan rapi yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam amar makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas.

⁶¹ Ada yang menggunakan istilah faktor internal dengan penjelasan sebagai berikut: Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan islam. Dapat dibaca dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html>

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 153

2. Faktor Eksternal (obyektif)

a) Ketidakmurnian dan tidak selarasnya Amalan Islam dengan Qur'an dan Sunnah

Dalam realitas empirik, praktek-praktek ritual (ubudiyah) masih banyak bercampur aduk antara apa yang diajarkan oleh Islam dengan berbagai amalan lain yang berasal dari ritual kepercayaan lain. Sebagai contoh, masih mentradisinya sesaji yang ditujukan kepada para arwah, kepada roh-roh halus, selamatan saat kematian misalnya menujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari dengan dibacakan bacaan tertentu seperti bacaan tahlil, yasin, ayat kursi dan sebagainya yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Amalan tersebut jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal kepercayaan, masyarakat.⁶³

Islam masih banyak yang percaya terhadap perantara (washilah) yang akan menghubungkan antara dirinya dengan Allah, seperti bertawashul kepada Syaikh Abdul Kadir Jailani, kepada Nabi, Malaikat, para Auliya (wali) dan

⁶³(QS al-Fatihah: 5, Al-Baqarah: 286, al-An'am: 164, an-Najm: 39)

lainya. Paham ini jelas bukan dari Islam,⁶⁴ bahkan dalam konsep Islam, Tuhan sangat dekat sekali dengan hambanya, yang oleh karenanya tidak memerlukan perantara sewaktu memohon kepadanya.⁶⁵

b) Tidak Terdapat Lembaga Pendidikan Islam yang Memadai

Lembaga pendidikan Islam yang ada pada saat itu adalah pesantren yang hanya mengajarkan 'mata pelajaran agama' dalam arti sempit, yaitu terbatas pada bidang: fiqh agama,⁶⁶ yang meliputi mata pelajaran bahasa Arab, terjemah, tafsir, hadis, tasawuf/akhlak, aqaid, ilmu mantiq, dan ilmu falaq. Sedangkan mata pelajaran yang bersangkutan paut dengan urusan keduniaan (muamalah duniawiyah), yang sering disebut ilmu pengetahuan umum seperti sejarah, ilmu bumi, fisika, kimia, biologi, matematika, ekonomi, dan sosiologi sama sekali tidak diperkenalkan di lembaga pendidikan Pesantren. Padahal lewat ilmu-ilmu pengetahuan ini, seorang muslim akan mampu melaksanakan tugas-tugas keduniaan yang penting.

⁶⁴(QS.Az-Zumar: 3)

⁶⁵(QS. Al-Baqarah: 186, al-Hadid: 4, al-Waqi'ah: 85)

⁶⁶(Iqhuddin, QS. At-Taubah: 122)

Melihat situasi semacam ini, KH. Ahmad Dahlan berikhtiar untuk menyempurnakan pendidikan yang ada dengan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Sehingga dengan pendidikan yang padu tersebut akan lahir generasi muslim yang "bertakwa kepada Allah" sekaligus "cerdas lagi terampil", yang dalam terminologi al-Qur'an disebut sebagai "ulul albab"⁶⁷

c) Kelemahan kepemimpinan Islam

Menurut Dahlan, ada tiga kelemahan pemimpin : (1) terbatasnya pengetahuan; (2) lebih banyak berbicara dari pada berbuat; (3) lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan umum. Bagi Dahlan persaudaraan dan kebahagiaan hidup bersama adalah suatu kebenaran. Dalam perspektif ini kelahiran Muhammadiyah didorong oleh kesadaran yang dalam tentang tanggung jawab sosial yang pada masa itu sangat terabaikan. Dengan kata lain, doktrin sosial Islam tidak digumulkan dengan realitas kehidupan umat.

d) Meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia

Kaum kolonial termasuk Belanda masuk menjajah Indonesia mengibarkan panji "tiga G", yaitu glory, gold, dan gospel. Pertama, Glory

⁶⁷(QS al-Mujadilah: 11, Ali Imron: 191)

(menang) suatu motif untuk menjajah dan menguasai negeri jajahan sebagai daerah kekuasaannya. Kedua, gold (emas, kekayaan) adalah motif ekonomi yaitu, mengeksploitasi, memeras, dan mengeruk harta kekayaan negeri jajahan. Ketiga, gospel (injil) yaitu motif menyebarluaskan ajaran Kristen kepada anak negeri jajahan. Untuk motif yang ketiga B.G. Schweits menyatakan: "... oleh karena penduduk pribumi, yang mengenal eratnya hubungan agama dengan pemerintahan, setelah masuk Kristen akan menjadi warga-warga loyal lahir batin bagi Kompeni, sebutan yang diberikan kepada administrasi Belanda itu".

Dalam mewujudkan ketiga motif tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menggarap penduduk bumi putra lewat dua langkah besar, yaitu: program asosiasi dan Kristenisasi. Program asosiasi ialah program pembudayaan yaitu mengembangkan budaya barat sedemikian rupa hingga orang Indonesia mau menerima kebudayaan barat sebagai kebudayaan mereka walaupun tanpa mengesampingkan kebudayaannya sendiri. Program ini sering juga disebut dengan program westernisasi. Sementara program kristenisasi, yaitu program yang ditujukan untuk mengubah agama penduduk, yang Islam maupun yang bukan menjadi Kristen. Pada abad ke 19, banyak orang Belanda baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda sangat berharap untuk

menghilangkan pengaruh Islam dengan proses Kristenisasi secara cepat atas sebagian besar orang Indonesia. Pelaksanaan program kristenisasi ini semakin meningkat pada waktu pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg (1909-1916) dengan melancarkan program yang lebih populer dengan sebutan "Kristening Politik". Konstitusi Belanda memperkenalkan misi-misi Kristen, baik Roma Katholik maupun Protestan untuk beroperasi di Indonesia, dan pekerjaan misi di daerah koloni dibantu oleh dana negara. Dengan adanya program ini, sejarah mencatat bahwa setelah tahun 1909 kelompok-kelompok Zending Kristen sangat cepat memperluas kegiatan mereka di daerah kepulauan Indonesia.

e) Tekanan Dunia Barat, terutama bangsa Belanda ke Indonesia

Hadirnya bangsa-bangsa Eropa Belanda ke Indonesia, khususnya dalam aspek kebudayaan, peradaban dan keagamaan telah membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan Islam Indonesia. Lewat pendidikan model barat yang mereka kembangkan, dengan ciricirinya yang sangat menonjolkan sifat intelektualisme, individualisme, elitis, diskriminatif, serta sama sekali tidak memperhatikan dasar-dasar moral keagamaan (sekuler), maka lahirlah suatu generasi baru bangsa Indonesia yang terkena pengaruh paham rasionalisme dan

individualisme dalam pola pikir mereka. Bahkan lebih jauh, HJ. Benda menyatakan bahwa “pendidikan Barat adalah alat yang paling pasti untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia”⁶⁸.

Apa yang diharapkan oleh pemerintah Belanda di atas, tandatandanya segera terlihat, antara lain: seperti munculnya sikap acuh tak acuh terhadap agama Islam, kalau tidak malah melecehkan. Mereka menganggap selama mereka masih menampilkan keIslam-annya, mereka rasanya belum dapat disebut sebagai orang modern, orang yang berkemajuan. Lebih dari pada itu, dalam menyikapi kehidupan umat Islam di Indonesia, Belanda benarbenar mengikuti petunjuk Snouck Horgronje. Ia merekomendasikan kepada Pemerintah Belanda bahwa sebenarnya Islam dapat dibagi dua, yaitu Islam religius dan Islam politik. Terhadap Islam religius dia menyarankan agar pemerintah bersikap toleran. Bahkan sikap seperti ini dinyatakan sebagai *conditio sine qua non*, syarat yang tidak boleh tidak harus diwujudkan demi menjaga ketenangan dan stabilitas, seperti memberikan toleransi kepada umat Islam untuk mengerjakan ibadah sembahyang, haji, dan sebagainya. Sementara

⁶⁸Mustafa Kamal Pasha dan Adabi Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis* (LPPI UMY, 2003). hlm.125

terhadap Islam politik, pemerintah dianjurkan tidak memberikan toleransi sama sekali, bahkan sebaliknya harus ditekan semaksimal mungkin. Tegasnya bagi pemerintah Belanda dalam menyikapi umat Islam Indonesia harus membedakan Islam ke dalam dua kategori, musuh Belanda bukan Islam sebagai agama, akan tetapi yang menjadi musuh Belanda adalah Islam sebagai doktrin politik.

f) Pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam.

Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh KH. A. Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan dalam Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Syaikh Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Sayyid Jamaluddin al-fghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan sebagainya. Terutama sekali pengaruh dari MuhammadAbduh lewat tafsirnya yang terkenal, yaitu al-Manar suntingan Rasyid Ridha serta majalah al-Urwatul Wustqa. Lewat telaah KH. A. Dahlan terhadap berbagai karya para tokoh pembaharu di atas serta kitab-kitab lainnya yang seluruhnya menghembuskan angin segar untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai ajaran sesat dengan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah, mendapat inspirasi yang kuat untuk

membangun sebuah gerakan Islam yang berwibawa, teratur, tertib, dan penuh disiplin guna dijadikan wahana untuk melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi maunkar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan sekian faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, Prof. Dr. Mukti Ali dalam bukunya "interpretasi Amalan Muhammadiyah" menyimpulkan adanya empat faktor yang cukup menonjol, yaitu:

1. ketidakbersihan dan campur – aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia
 2. ketidak efisienan lembaga-lembaga pendidikan Islam
 3. aktifitas misi-misi katholik dan protestan
 4. sikap acuh tak acuh, malah kadang-kadang sikap merendahkan dari golongan intelegensi terhadap Islam.
- Pendiri Muhammadiyah.

K.H. Ahmad Dahlan ketika kecil bernama Muhammad Darwis. Lahir pada tahun 1868 M di Kampung Kauman sebelah Barat Alun-alun Utara Yogyakarta. Dahlan berasal dari keluarga Muslim yang taat. Ayah dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang pegawai masjid (penghulu), salah seorang dari 12 penghulu di lingkungan Keraton Yogyakarta. Nama ayahnya adalah Abu Bakar,

ulama dan Khotib di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri dari H. Ibrahim yang menjabat penghulu Kasultanan. Muhammad Darwis masih keturunan Maulana Malik Ibrahim yaitu salah satu Wali Sembilan (Wali Songo) yg terkenal. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12.⁶⁹

Pendidikan Dahlan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masjid, kemudian ke Mekkah. Pada tahun 1883 ketika berusia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji yang pertama dan bermukim di tanah suci sekitar lima tahun dengan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, seperti Al Qur'an, teologi, astronomi, dan hukum agama (fiqh), termasuk didalamnya mempelajari karya-karya Muhammad Abduh. Gurunya yang terkenal adalah Syaikh Ahmad Khatib, yang juga guru KH. Hasyim Asy'ari. Ketika usia 20 tahun (yaitu pada tahun 1888) ia pulang ke kampungnya, dan berganti nama dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan, kemudian diangkat sebagai Khotib Amin di lingkungan Kasultanan Yogyakarta.⁷⁰

⁶⁹Lihat Yusron Asro'e, Kyai Haji Ahmad Dahlan, *Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005) hlm. 42

⁷⁰ Sudarno Shobron, et al, *Studi Kemuhammadiyah*, hlm. 30-32.

Pada ibadah haji yang kedua tahun 1902, KH. Ahmad Dahlan (berusia 35 tahun) bertemu dengan murid Muhammad Abduh, yakni Syaikh Muhammad Rasyid Ridla dan berdiskusi tentang berbagai persoalan agama dan problem yang dihadapi umat Islam. Saat itulah ia mendapat kematangan berpikir dan mampu berijtihad dengan mendasarkan diri pada sumber aslinya, Alquran dan Sunnah. Ketika kembali ke Indonesia, sepulang dari Makkah kemudian menikah dengan Siti Walidah binti K.H. Fadhil. Hasil pendidikan di Makkah membuat H. Ahmad Dahlan berfikir bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang menimpa umat Islam di Indonesia. Ide-ide pembaruan yang diperoleh dari Timur Tengah dicoba untuk diterapkan di Indonesia.⁷¹

Sosok dahlan adalah sosok man of action. Beliau adalah “made history for his works than his words.” Hal ini berbeda dengan tokoh-tokoh pembaru lain seperti A. Hasan dan Ahmad Surkati yang cukup produktif dalam dunia tulis menulis. Yang penting bagi Dahlan tampaknya adalah bahwa doktrin dan aksi harus menyatu. Bila diukur dengan semangat zaman waktu itu, KH.A. Dahlan adalah seorang revolusioner. Pada saat orang membesar-besarkan pentingnya

⁷¹Mutafa Kamal Pasha dan Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta : LPPI UMY, 2003) hlm. 109

ziarah kubur, Dahlan malah memberikan fatwa pada tahun 1916 tentang haramnya perbuatan itu. Fatwa ini sangat menggemparkan masyarakat dan para ulama. Ia dituduh sebagai Mu'tazilah, Inkarus Sunnah, Wahabi, dan lainnya. Hal ini tidak berlebihan, karena Dahlan mendorong penggunaan akal fikiran dalam memahami dan mengamalkan agama, yang merupakan respon terhadap kebiasaan umat waktu itu menerima agama secara taklid.⁷²

Ketika Kongre Al-Islam di Cirebon yang diadakan oleh Serikat Islam pada bulan Oktober 1922 Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan Ahmad Syurkati (Al-Irsyad) terlibat perdebatan dengan Islam Ortodoks. Muhammadiyah dipersalahkan menyerang aliran yang telah mapan (tradisionalis-konservatif) yang dianggap membangun Madzab baru diluar Madzab empat yang telah ada dan Muhammadiyah dituduh mengadakan tafsir Al-Qur'an baru.⁷³ Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan : "Muhammadiyah berusaha bercitacita mengangkat agama Islam dari keadaan terbelakang, banyak

⁷² Prof. Dr. H. Ahmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 24.

⁷³ Dahlan sebagai tokoh kontroversial sudah lama dikenal masyarakat Yogyakarta. Orang masih ingat peristiwa tahun 1897 pada waktu Dahlan membenarkan arah kiblat di Masjid Gedhe Kauman Yogya dengan risiko suraunya yang baru dibangun dihancurkan para penentang.

penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama daripada Al-Qur'an dan Hadist. Umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadist, Umat Islam harus mempelajari langsung dari sumbernya tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir”

- Lambang Muhammadiyah

1. Bentuk Lambang

Sebuah organisasi biasanya mempunyai lambang sebagai sebuah simbol pemersatu bagi pengikutnya. Dan setiap lambang yang dibuat tentu saja mempunyai makna filosofis yang mendalam yang erat hubungannya dengan visi dan misi gerakan. Bentuk lambang Muhammadiyah adalah matahari yang memancarkan dua belas sinar ke semua penjuru, dengan sinar yang bersih putih bercahaya. Ditengah-tengahnya terdapat tulisan arab berbunyi Muhammadiyah, dan pada lingkaran bagian atas dan bagian bawah terdapat tulisan dua kalimah syahadat. Seluruh gambar matahari dengan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun

. 2. Penjelasan Lambang

Matahari merupakan salah satu benda langit ciptaan Allah. Dalam sistem tata surya matahari menempati posisi sentral (holiosentris) yaitu menjadi titik pusat

dari semua planet-planet lain. Matahari merupakan benda langit yang darinya sendiri memiliki kekuatan memancarkan sinar panas yang sangat berguna bagi kehidupan biologis semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan tanpa sinar matahari, bumi akan membeku dan gelap gulita, sehingga semua makhluk hidup tidak mungkin dapat meneruskan kehidupannya.

Muhammadiyah menggambarkan jati diri, gerak, serta manfaatnya sebagaimana matahari. Kalau matahari menjadi penyebab lahiriyah berlangsungnya kehidupan secara biologis bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, maka Muhammadiyah akan menjadi penyebab lahiriyah berlangsungnya kehidupan secara spiritual, rohaniah bagi semua orang yang mau menerima pancaran sinarnya yang berupa ajaran Islam sebagaimana termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ajaran Islam yang hak dan lagi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَن

اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi

antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS al-Anfal: 24).⁷⁴

Dua belas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru mengibaratkan tekad dan semangat pantang menyerah dari warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai tekad dan semangat pantang mundur dan menyerah dari kaum hawary, sahabat nabi Isa AS yang jumlahnya 12 orang. Karena tekad dan semangatnya telah teruji secara meyakinkan maka Allah pun berkenan mengabadikan mereka dalam QS al-Shaf (61): 14

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ

أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam Telah Berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 175

segolongan lain kafir; Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang.(QS al-Shaff (61): 14).⁷⁵

Warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Keikhlasan yang menjadi inti ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan rasulullah, dijadikan jiwa dan ruh perjuangan Muhammadiyah, dan yang sejak awal sudah ditanamkan oleh KH. A.Dahlan. Oleh karena itu, Muhammadiyah dalam berjuang untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Karena keyakinan yang sungguh-sungguh pada setiap perjuangan yang didasari oleh iman dan ikhlas, maka kekuatan apapun tidak ada yang mampu mematahkannya.

Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Muhammadiyah berjuang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam rangka merealisasikan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian,selamat, dan sejahtera bagi umat manusia.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahny* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 421

C. Letak Geografi Lokasi Penelitian

Kualuh Hilir merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Indonesia.⁷⁶

Kecamatan **Kualuh Hilir** dengan luas wilayah 38.548 Ha, (Pesisir). Jumlah penduduk 30.052 jiwa (2001) dan mayoritas penduduknya adalah Islam.

1. Desa : Teluk Pulau Luar
2. Desa : Kelapa Sebatang
3. Desa : Air Hitam
4. Desa : Pangkalan Lunang
5. Desa : Teluk Pulau Dalam
6. Desa : Simandulang

Jumlah rumah taNGGA YANG MISKIN 2.163

Jumlah Puskesmas

1.Kampung Mesjid

2.Kuala Bangka

⁷⁶ https://ms.wikipedia.org/wiki/Kualuh_Hilir,_Labuhanbatu_Utara di akses pada 21 September 2018

Potensi Daerah

Daerah Kecamatan Kualuh Hilir memiliki lahan pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti Beras Kuku Balam (BKB) Kecamatan Kualuh Hilir seluas 13.000 Ha, sangat terkenal sampai ke luar Sumatera, komoditi andalan lainnya dari daerah ini sayur-sayuran, pisang barangan, jagung, cabai dan buah salak pondoh leidong.

Hasil andalan dari Kecamatan Kualuh Hilir adalah dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain kedua komoditi unggulan tersebut, juga daerah ini penghasil kakao, kelapa dan pinang.

Perkebunan yang ada terdiri dari kebun rakyat 92.274 Ha dengan komoditi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan pinang. Sedang perkebunan milik negara 46.002,42 Ha dengan komoditi kelapa sawit dan karet. Perkebunan milik swasta nasional seluas 52.126,29 Ha, dengan komoditi kelapa sawit dan karet dan Perkebunan milik swasta asing seluas 4.08,42 Ha komoditi karet. Pengolah hasil komoditi perkebunan terdiri dari pabrik kelapa sawit ada 8 unit pabrik pengolah karet ada 2 unit dan pabrik pengolah minyak goreng ada 2 unit.

Berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan RI nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 februari 2005 ada seluas 159.624 Ha terdiri dari hutan lindung 44.666.45 Ha, hutan produksi 72.406.90 Ha, hutan produksi terbatas 39.560.45 Ha. Hutan suaka alam (hutan konservasi) 997.34 Ha dan hutan konversi 1.993 Ha. Hutan lindung terletak didaerah pegunungan dan garis pantai.⁷⁷



Peta: wilayah Kecamatan Kualuh Hilir 2018

⁷⁷ http://solo.forum-pendidikan.web.id/id3/2150-2046/Kualuh-Hilir-Labuhanbatu-Utara_195400_stietrianandra_solo-forum-pendidikan.html di akses pada 21 September 2018

BAB IV

HUKUM HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN TAUKE PADI MENURUT TOKOH AL-WASHLIYAH DAN MUHAMDIYAH.

A. Praktek hutang Piutang Bersyarat antara petani dan Tauke Padi di kecamatan

Kualuh Hilir

Praktek hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi pada umumnya di Kualuh Hilir dengan cara yang sangat berbeda dengan biasanya. Kualuh hilir merupakan salah satu daerah yang erletak di Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu kecamatan yang mata pencahariaan pada umumnya adalah petani padi. Dan terkenal dengan luasnya lahan pertanian sawah.

Di kualuh Hilir sering terjadi pekerjaan antara etani dan tauke, dimana seorang petani yang tidak memiliki lahan pertanian sawah harus meminjam lahan kepada pemilik tanah, dimana seorang pemilik tanah ini merupakan tauke pembeli padi juga.

Ketika petani meminjam tanah sesuai bidang yang diinginkan, dengan imbalan penyewaan menggunakan hasil padi tadi, dan tidak

tutup kemungkinan dengan uang langsung sesuai dengan akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Namun yang menjadi permasalahan adalah dimana seorang tauke padi/yang meminjamkan tanah perkebunan padi mengharuskan kepada petani untuk menjual hasil tanaman kepadanya dengan opsi pemotongan harga yang tidak sesuai pada umumnya harga.

Dan telah melakukan wawancara dengan salah satu warga baoak Ahmad Zailani seorang petani padi berumur 47 tahun mengatakan bahwa dalam kejadian ini mereka harus merelakan harga yang tidak sesuai demi mendapatkan pinjaman tanah pertanian yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun dalam ucapannya disebutkan kepuasan batin pastinya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Beliau sudah bertani selama puluhan tahun.⁷⁸

B. Pendapat beserta dalil Tokoh Al Washliyah kecamatan Kualuh Hilir

⁷⁸ Wawancara pada 12 Agustus di Kecamatan Kualuh Hilir.

Menurut pendapat tokoh Al-washliyah yang bernama bapak Abduh S.Ag, dalam hal ini dengan cara pembayaran tersebut saya menafsirkan bahwa pelaksanaan hutang piutang antara petani dan tauke padi itu termasuk kedalam riba, yang mana riba sudah jelas pengharamannya, karena adanya keharusan dan kewajiban pembayarannya. Hanya saja zaman sekarang banyak orang mengabaikan dan tidak mengikuti aturan hukum, sehingga mereka seakan tutup mata dan tutup telinga mengenai hal tersebut. Haram dikatakan sebab termasuk hutang dan pembayarannya yang di pungut manfaatnya sehingga yang berhutang merasa terbebani dan disitu terdapat kerugian kepada si yang berhutang tadi.⁷⁹

Adapun dalil yang dia sebutkan adalah Al-qur'an surah Ali-Imron ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

⁷⁹ Bapak Abduh S.Ag Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan **riba** dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁸⁰*

Dan juga Menurut Bapak Khoirul Azmi S.Pd selaku tokoh Al-washliyah, beliau berpendapat setiap hutang yang pembayarannya membawa keuntungan maka hukumnya riba, hal ini terjadi karena salah satunya mensyaratkan keharusan pembayaran atau penjualan kepada orang yang memberikan pengutangan kepada orang yang berhutang, dengan kata lain yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram.⁸¹

Dan dari beberapa pendapat tokoh Al-washliyah ada juga yang tidak sejalan pendapatnya dengan tokoh-tokoh lainnya yaitu Bapak Supyanto selaku tokoh Al-washliyah, pendapat saya Boleh, karena hutang kan memang harus dibayar dan wajib di bayar kepada orang yang memberi hutang. Ya sah saja apabila

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahny* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 328

⁸¹ Bapak Khairul Azmi S.Pd Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

orang yang memberi hutang meminta penambahan harga atau mewajibkan memberikan hasil dari si pengutang kepada orang yang memberikan hutang, supaya hutangnya dapat terlunasi.

Dengan ini menjelaskan bahwa, unsur *ghoror* merupakan terdapat didalamnya, disebabkan unsur paksaan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa ada menyesuaikan dengan harga pasar pada umumnya.

Disebutkan juga dalam firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah (Yang punya kuasa) menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al Baqarah: 245).⁸²

C. Pendapat beserta dalil Tokoh Muhammadiyah kecamatan Kualuh Hilir

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 102

Menurut pendapat Tokoh Muhammadiyah yang bernama bapak Akhyaruddin, menurut saya sah-sah saja. Karena, menolong orang yang dalam kesulitan adalah amalan yang sangat mulia. Memberi uang, barang atau pun sejenisnya kepada orang yang membutuhkan saya rasa itu wajar ada timbal baliknya. Ya wajar si pemberi hutang tadi meminta rasa timbal balik kepada orang yang berhutang tersebut. Selagi orang yang berhutang dan yang memberi hutang sama-sama rela dan ikhlas, Bahkan saya sendiri melakukan hal tersebut.⁸³

Dan dalam akad yang sudah dilakukan merupakan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, namun walaupun secara harga yang berbeda namun itu merupakan kesepakatan yang telah disepakati.

Dan ditegaskan kembali semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun

⁸³ Bapak Akhyaruddin Adalah Seorang Tokoh Muhammadiyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2017).

konsep, manajemen dan mensukseskannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS: Al-Maidah: 1).⁸⁴

Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan respon positif mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut andil. Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, kita harus melihat dan menimbanginya dengan aturan agama kita. Jika tidak bertentang dengan prinsip


⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 162

agama dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah meski nafsu sangat menginginkannya.

D. Munaqosyah Adillah

Utang bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang berpiutang, sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang, maka sebelum perjanjian itu disepakati, pihak yang berutang boleh membatalkannya.

Pada dasarnya pemberian syarat dalam perjanjian utang piutang adalah boleh, selama syarat itu tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat islam, misalnya mensyaratkan untuk mencatat utang tersebut atau memberikan barang jaminan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... 

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁸⁵

Menurut ayat ini, dalam utang piutang diperlukan surat utang sebagai bukti untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul dikemudian-hari.

Mengenai masalah utang bersyarat ini, keempat imam mazhab memberikan beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Hanafiyah memakruhkan seseorang yang berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang mengutangkan gandum yang kotor kemudian mensyaratkan agar orang tersebut untuk membayarnya dengan gandum yang bersih.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa haram dalam utang piutang menentukan syarat untuk mendapatkan manfaat, misalnya mensyaratkan membayar utang dengan hewan yang sehat padahal hewan yang diutangkan lemah.

⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 112

c. Hanabilah menyebutkan bahwa dalam utang piutang tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya.

d. Sedangkan Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:

- 1) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
- 2) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
- 3) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian utang piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum islam, apabila syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan salah satu pihak, seperti mensyaratkan adanya barang jaminan yang dapat di pegang apabila terjadi utang piutang.

Dari pendapat tokoh agama yang berada di Kecamatan Kualuh Hilir bapak al-Ustadz Hasan orang yang berhutang pada kreditur (juragan) hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang yang ekonominya lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka juragan berinisiatif untuk menolongnya.⁸⁶ Keinginan juragan ini sesuai firman Allah:

... وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁸⁶ Wawancara pada 10 Agustus 2018 di Kecamatan Kualuh Hilir.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS: Al-Maidah: 2).⁸⁷

Para kreditur (juragan) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan (uluran tangan) dan sebagai salah satu jalan atau upaya kreditur (juragan) untuk membantu mengembangkan usahanya. Memberi hutang kepada para debitur berarti kreditur (juragan) telah mempunyai para pelanggan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan kreditur (juragan) sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya. Menurut Jamil, ada keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat debitur, yaitu melalui pertolongan (uluran tangan) dari juragan dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

E. Pendapat yang paling rajah

Dari uraian di atas penulis dapat memilih pendapat yang paling rajah adalah pendapat Tokoh Al-Washliyah. Dikarenakan pendapat ulama-ulama yang terdahulu pun sejalan dengan pendapat tokoh Al-Washliyah karena setiap

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), hlm. 157

hutang yang pembayarannya membawa keuntungan maka hukumnya riba, hal ini terjadi karena salah satunya mensyaratkan keharusan pembayaran atau penjualan kepada orang yang memberikan pengutangan kepada orang yang berhutang, dengan kata lain yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram.

F. Pendapat yang paling relevan untuk diaplikasikan di Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir.

Masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani , dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada yang sawahnya yang hanya menyewa kepada orang lain guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun di Kecamatan Kualuh hilir ini ada yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk mengerjakan sawahnya.

Disamping itu terkadang banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha sambilan (sampingan).

Apabila seorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan, upaya apapun harus dilaksanakan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para petani Kualuh Hilir melaksanakan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir yaitu : Misalkan si A sebagai petani, sedang si B sebagai tokeh padi. A berkata pada si B mau membeli bahan sejenis racun atau pupuk senilai satu sak pupuk yang harganya senilai Rp. 500.000 untuk mengerjakan lahan sawah”, lalu si B menjawab “saya mau memberikan kamu pupuk tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa mendapatkan uang

Rp.600.000. maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.100.000 dari hasil padi yang didapat dari si A.

Perjanjian hutang-piutan itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagai lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung dan digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara petani dengan tokeh padi (orang yang memberikan hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut petani akan mendapatkan pinjaman uang dari tokeh padi untuk mengerjakan sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau

ukuran perkawintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

Dari kondisi masyarakat dalam sosial dan tokoh agama yang ada disana penulis menyatakan kalau yang paling tepat untuk dilaksanakan hukumnya yaitu berdasarkan pendapat yang lebih kuat (qoul rajih), untuk tidak melaksanakan utang piutang bersyarat ini, dan agar supaya tidak menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut.

BAB V

PENUTUP

C. KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai Hukum utang piutang bersyarat antara petani dan tauke hini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian hutang-piutang ini masih berlangsung dan hampir menjadi tradisi di masyarakat dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagai lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu..
2. Pendapat tokoh tokoh yang ada di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhanbatu Utara yaitu tokoh al-washliyah dan muhammadiyah berbeda pendapat mengenai masalah hukum nya, tokoh washliyah berpendapat tidak boleh sedangkan pendapat tokoh muhammadiyah boleh
3. Dari kondisi masyarakat dalam sosial dan tokoh agama yang ada disana penulis menyatakan kalau yang paling tepat untuk dilaksanakan hukumnya yaitu berdasarkan pendapat yang lebih kuat (qoul rajih), untuk tidak melaksanakan utang piutang bersyarat ini, dan agar supaya tidak menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut.

D. Saran

Dengan peran masyarakat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT,. Banyak cara-cara yang menjadi sebuah permasalahan termasuk memberi utang piutang bersyarat, dengan pembahasan perbedaan tokoh agama di atas yang dituntaskan dengan memilih pendapat yang lebih kuat, memberikan saran agar antara si pengutang agar memudahkan jalan bagi orang yang berhutang dengan tidak meminta syarat sehingga menjadi beban bagi yang berhutang. Diharapkan juga agar membahas perbedaan perbedaan masalah syar'i yang menjadi perdebatan diantara masyarakat. Dengan penelitian ini akan memberi sebuah jawaban.

Agar ulama-ulama yang ada di semua tempat agar cepat-cepat memberikan kepastian hukum sesuai kondisi dan manfaat demi menghindari keresahan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teorike Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- atmadja, Karnaen Purwa. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Islam*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, Cet. ke-1.
- Fatah, Toto Abdul. *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, Jawa Barat: MUI, th, 2001.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta. Rajawali Pers, 2002.
- Hasan, Ali. *Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Usaha Kami, 1996.
- Huda, nurul, dan Heykal Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lihat Asro'e, Yusron. Kyai Haji Ahmad Dahlan, *Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005).
- Mustafa Kamal Pasha dan Adabi Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis*, LPPI UMY, 2003.

- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Prof. Dr. H. Ahmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Rahmad al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004.
- Rahman al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensido, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000.
- Sugiono, *Metodologo Penelitian Statistik*. Bandung. Alfabeta, 2008
- Suharsimi, Arikanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 1996
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sumitro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surya, brata Umadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Rajawali Pers, 1992
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Sinar Baru Algensido, Bandung , 2013 .

Umar Capra, M. *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung. Diponegoro, 1995

Zuhdi, Masyuk. *MasailFiqih*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Daftar Wawancara

Bapak Abduh S.Ag Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

Bapak Khairul Azmi S.Pd Adalah Seorang Tokoh Alwashliyah Yang Beralamat Di Kualuh Hilir (Via telepon Pada Hari Minggu Tanggal 12 Desember 2017).

Bapak Akhyaruddin Adalah Seorang Tokoh Muhammadiyah Yang Beralamat Di KualuhHilir (Via telepon Pada Hari RabuTanggal 15 Desember 2017).